

# RENCANA KERJA 2023

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Jl. Beringin II No.35 Telp.(0721) 481301 TelukBetung 35222  
Email : [bkd.lampungprov@gmail.com](mailto:bkd.lampungprov@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja BKD Tahun 2023 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dapat lebih sempurna lagi.

Bandar Lampung, 2022  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,



**MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770505 199712 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2021.....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah .....	6
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.....	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah .....	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	35
<b>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....</b>	<b>37</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional .....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah .....	39
3.3. Program dan Kegiatan .....	35

<b>BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....</b>	<b>47</b>
4.1. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.....	47
4.2. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah.....	48
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>49</b>

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKD Provinsi Lampung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan RENJA SKPD adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 8) Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
  - 9) Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
  - 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian Provinsi Lampung dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2023.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Dokumen Renja

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra  
Badan Kepegawaian Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian daerah**

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan , yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung. Program dan Kegiatan diampu oleh empat bidang, dan satu sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2021 terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 8 sub kegiatan :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    6. Penyediaan Bahan/Material
    7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
    2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
    - a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari 5 sub kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
  4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  5. Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  2. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
1. Pengelolaan Mutasi ASN
  2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  3. Pengelolaan Promosi ASN

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki 2 Program, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Berikut Program Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi anggaran dan Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2021 meliputi :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 2.106,674,707,- dan terealisasi sebesar 97.50% dan dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.99% yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

#### **a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96.44% dengan target 13 dokumen yang telah tersusun.

#### **b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capain realisasi anggaran sebesar 96.44% dengan target 9 dokumen yang telah terevaluasi.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan target kinerja yaitu terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung dan realisasi anggaran sebesar 98.51%

**b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan PWRI dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94.93%

**c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran target kinerja 6 dokumen yang terdiri dari 2 laporan fungsional, 2 neraca, 2 BKU, dengan total kinerja 24 dokumen yang telah tersusun sampai dengan akhir tahun dan capaian realisasi anggaran 88.26%

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 33 buah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu), sehingga realisasi anggaran dari sebesar 100%.

**b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 98.36%.

**c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi anggaran 100% yang terdiri dari pembelian keset, tissue, sapu ijuk, kemoceng, kotak sampah, lap pel.

**d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan dengan target kinerja penjilidan dan cetak, sehingga realisasi anggarannya sebesar 100%.

**e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dengan realisasi anggaran sebesar 100%

**f) Penyediaan Bahan/Material**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang perkantoran yang terdiri dari pembelian ATK dan materai, sehingga realisasi anggaran 99.99%

**g) Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan dengan terlaksananya rapat – rapat dalam maupun luar sehingga realisasi anggaran dari tahun 2021 sebesar 99.94%

**h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar kota sehingga realisasi anggaran 99.97%



**d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 12 bulan terbayarkannya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai sarana rutinitas perkantoran. Terdapat selisih anggaran yang disebabkan karena pembatasan rutinitas perkantoran dan kebijakan **Work From Home** sehingga kinerja diperkantoran menjadi terbatas. Jadi jumlah capaian realisasi anggaran hanya 43.91%

**b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor dengan terbayarnya honorarium PTHL dan honor operator perencanaan/keuangan sehingga capaian realisasi anggaran 100%.

**e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kendaraan dinas perkantoran yang terawat dan diperlihara dengan target kinerja 12 unit pemeliharaan kendaraan dinas sehingga realisasi anggaran 94.40%

**b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terawat dan terpelihara dengan terawatnya pemeliharaan AC, unit komputer dan pemeliharaan servis penyedot air sebagai penunjang urusan rutinitas perkantoran, sehingga realisasi anggaran 99.48%

**c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi anggaran 99.34%

**2. Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian sasarannya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 5.898.579.632,- terealisasi sebesar 76.26%. Indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL yang terbayarkan dengan dengan capaian realisasi anggaran 77.96%. Berikut realisasi fisiknya antara lain:

**Pengadaan ASN Tahun 2021**

No	ASN	Alokasi Formasi	Jumlah Formasi	Pendaftar	Lulus	Keterangan
1.	PPPK	Tenaga pendidikan	277	2.275	257	Pelaksanaan Dinas Pendidikan
2.	CPNS	Tenaga Kesehatan	102	1.122	92	Kepgub Lampung No. G/326/VI.04/Hk/2021 tentang Penetapan Kebutuhan ASN TA.2021
		Tenaga Teknis (CPNS)	50	2.569	48	
		<b>Total</b>	<b>427</b>	<b>5.966</b>		

**Pengurusan Administrasi PNS**

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<b><u>Administrasi PNS</u></b>	
	-Kartu pegawai	17 orang
	-Kartu suami	345 orang
	-Kartu istri	339 orang

2.	<b><u>Pengadaan mutasi pegawai</u></b> -Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Penugasan/Penarikan/Pengembalian Pegawai DPK	2 orang 12 orang 14 orang
3.	<b><u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u></b> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 665 orang

### b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan (BUP) dengan capaian realisasi anggaran 69.45% dengan target kinerja 622 orang pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

#### Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	662
Janda/Duda	101
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	9
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	1

### c) Fasilitas Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ

KORPRI dengan capaian realisasi anggaran 47.33% terdapat selisih anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, dan dilaksanakan secara virtual.

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	80 orang	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	-	Tidak terlaksana
3.	Hut Korpri	-	Virtual
4.	Bapor dan Imtaq Korpri	-	Tidak terlaksana
5.	Lembaga Bantuan Hukum Korpri	-	Tidak terlaksana

#### d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android dengan capaian realisasi anggaran 100% dan target kinerja 51 data (Cetak dan jilid buku saku kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung) .

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urut kepeangkatan	1 buku

#### e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat dengan capaian realisasi anggaran 99.63%. dengan target kinerja 1930 dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang dapat diakuratkan.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3000 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	5570 dokumen	Triwulan II
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4500 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	1930 dokumen	Triwulan IV

#### b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

##### a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti Uji kompetensi dengan capaian realisasi anggaran 90.93% terdapat selisih anggaran dikarenakan peserta Uji Kompetensi lebih sedikit dari target serta pelaksanaan Diklat masih dibatasi karena Covid-19.

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	348 orang

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	3 orang	-	-	36 orang	49 orang	1 orang

### b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dengan capaian realisasi anggaran 84.16% dan realisasi fisiknya yaitu terlaksananya pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, serta terlaksananya proses pengantaran Praja IPDN.

#### Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2021

Ujian Dinas	2021
Tingkat I	239
Tingkat II	8

#### PNS yang mengikuti UPKP Tahun 2021

No.	Variabel	Lulus
1.	Basis S-2	10
2.	Basis S-1	34
3.	Basis D3	-

4.	Basis SMU	5
5.	Basis SMP	1

**IPDN yang dinyatakan lulus Tahun 2021**

<b>Fasilitasi Pengantaran Praja IPDN</b>
34 orang

**PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar Tahun 2021**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 orang
2.	Strata 3 (S3)	1 orang

**c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional dengan capaian realisasi anggaran 80.68% terdapat selisih anggaran dikarenakan pelantikan pejabat PSO yang dilaksanakan pada 31 Desember 2021.

**Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2021**

	Tingkatan	Jumlah
<b>SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional</b>	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	232
	Pengangkatan kembali	26
	Penyetaraan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional (penyederhanaan birokrasi)	503



**c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, monitoring evaluasi kinerja di PD dan sekolah - sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan capaian realisasi anggaran 84.01% terdapat selisih anggaran dikarenakan penundaan sosialisasi aplikasi SIKAP yang dilaksanakan pada 3 Januari 2022 dengan hasil kinerja evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- **Ucapan Ulang Tahun Untuk Pejabat di Tahun 2021 berjumlah 1142**
  
- **Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2021**

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	139
XX	155
X	304

## Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai (SIKAP)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

### Luncurkan Aplikasi "Sikap" untuk Tingkatkan Pelayanan Berbasis Digital

© Selasa, 04 Januari 2022 00:00 WIB - Waktu Baca 2 menit



#### b) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji dengan dengan capaian realisasi anggaran 89.35% .

##### Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	2 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	4 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	9 orang
<b>JUMLAH</b>		15 orang

##### Pelaksanaan Pelantikan Sumpah Janji PNS

NO	Jumlah	Keterangan
1.	384 orang	Virtual
2.	4 orang	Langsung

#### d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

##### a) Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS dengan dengan capaian realisasi anggaran 99.78%.

##### Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	83
Prov Lampung ke.kab/kota	42
Kab/kota ke.Provinsi lampung	55
Antar kab/kota di Provinsi lampung	214
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
<b>JUMLAH</b>	<b>394</b>

##### b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat Periode April/Oktober dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala dengan capaian realisasi anggaran 45.56% terdapat selisih anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi

sehingga pada kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat periode April dan Oktober tidak terlaksana secara maksimal.

**Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2021**

Bulan	2021
April	1.800
Oktober	9.228

**Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2021**

Golongan	Jumlah
I/ II	2473
III/IV	7139
IVc	72
<b>Total</b>	<b>9684</b>

**c) Pengelolaan Promosi ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan capaian realisasi anggaran 57.57% terdapat selisih anggaran dikarenakan penundaan untuk seleksi terbuka dan evaluasi JPTP.

**Pelantikan Pejabat Tahun 2021**

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	24
III (Administrator)	214
IV (Pengawas)	480
<b>Total</b>	<b>718</b>

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
1.	Seleksi Terbuka	5 Maret s/d 1 April 2021	- Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 43 orang	Terdapat 9 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 8 JPTP yang memenuhi syarat
2.	Uji Kompetensi	24 s/d 31 Desember 2021	4 Pejabat PTP	Untuk mengisi salah satu dari 7 Jabatan PTP yang lowong

Pencapaian hasil terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 rincian capaian fisk sebesar 91.95 % dan realisasi keuangan sebesar 88.38 %. Berdasarkan pada capaian realisasi fisik dari kegiatan selama tahun 2020, berikut kegiatan yang telah mencapai realisasi fisik diatas 90% sampai dengan 100% adalah kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan/Material
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Pengelolaan Data Kepegawaian
19. Pengelolaan Mutasi ASN
20. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Adapun sub kegiatan yang belum mencapai target yaitu sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
4. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
6. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
7. Pengelolaan Promosi ASN
8. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
9. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
10. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
11. Pembinaan Disiplin ASN

Sub-sub kegiatan diatas yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu antara lain :

1. Pembatasan Rutinitas Perkantoran dan kebijakan Work form Home sehingga kinerja diperkantoran menjadi terbatas
2. Terjadi reconfusing anggaran yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID-19 pada saat itu sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana.
3. Pada pengadaan CPNS terdapat selisih anggaran dikarenakan jumlah pelamar pada kegiatan CPNS tidak dapat diprediksi, untuk tahun 2021 pelamar hanya 3.558 orang sedangkan pada tahun 2019 peserta mencapai 14.987 orang.

4. Pada pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan terdapa sisa anggaran dikarenakan terdapat selisih dari harga satuan dalam DPA dengan tagihan dari BPJS.
5. Parjalanan dinas dibatasi dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat periode April dan Oktober tidak terlaksana secara maksimal

Hal tersebut tentu berdampak terhadap tujuan Renstra BKD Provinsi Lampung yaitu Mewujudkan Profesionalisme ASN Provinsi Lampung dengan dua sasaran antara lain :

1. Penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan Kompetensi

Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan sasaran penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan Kompetensi ASN, hanya saja saat ini pelaksanaan Assement Center di Provinsi Lampung belum maksimal dikarenakan belum adanya regulasi Internal terkait Manajemen ASN. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public

2. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik

Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan sasaran penempatan Peningkatan pelayanan berbasis elektronik akan terus di tingkatkan setiap tahunnya.

Pada Tahun 2021 target Kinerja sasaran Pertama sebesar 65% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan 67.93%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Pada sasaran kedua target kinerja sebesar 58% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 50%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil.

### Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi
1	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	65 %	67.93 %
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	58 %	50 %

Berikut akan disajikan berbentuk tabel yaitu Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2021, **(Tabel T-C.29, *terlampir*)**

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut :



- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian; dan
- e. Pengelolaan administratif.

BKD Provinsi Lampung dalam melaksanakan kinerjanya menopang Indikator Kinerja Utama (IKU), melalui 2 sasaran dimana sasaran tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh BKD Provinsi Lampung. Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam IKU BKD Provinsi Lampung caranya adalah dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKD Provinsi Lampung tahun 2021 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja khususnya pada Indikator Sasaran Pertama yaitu Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi mengalami peningkatan sebesar 4.43% yaitu saat Triwulan III sebesar 63.5% sedangkan pada Triwulan IV naik menjadi 67.93% dikarenakan terdapat 140 CPNS Tahun 2021, Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang dan Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang .

Sedangkan pada Indikator Sasaran Kedua yaitu Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada triwulan IV menjadi 50% meningkat sebesar 4.2% dari

triwulan II, dikarenakan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis elektronik yaitu terlaksananya Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari :

- ▶ Jumlah (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2021 sebanyak 49 orang;
- ▶ Jumlah Pejabat Fungsional yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2021 sebanyak 9.358 orang;
- ▶ Jumlah CPNS 2021 yang telah ditempatkan sesuai kompetensi 140 orang;
- ▶ Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang;
- ▶ Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang;
- ▶ Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebanyak 15.278 orang.

*(sumber data BKD Provinsi Lampung, Desember 2021)*

2. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik, untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administarsi kepegawaian dilihat dari :

1. Berapa banyak Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang telah dilaksanakan
2. Penerapan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, berikut disajikan road map rencana Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Lampung**

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65%	70%	75%	80%	64,82 %	67,93 %	75%	80%
2	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	58%	79%	91%	100%	50%	50%	91%	100%

**ROAD MAP RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASN  
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIMPEDU</li> <li>2. E-KINERJA</li> <li>3. SAPKT (Pengenalan dan Uji Coba) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-KGB</li> <li>• e-Pensiun</li> <li>• e-Cuti</li> <li>• e-SLKS</li> <li>• e-Formasi JFT</li> <li>• e-Formasi JFU</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentralisasi Server (KOMINFOTIK)</li> <li>2. Implementasi SAPKT</li> <li>3. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja berbasis Android (SIKAP)</li> <li>4. Pengembangan Aplikasi e-Dokumen</li> <li>5. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-Tugas Belajar</li> <li>• e-Ijin Belajar</li> <li>• e-Pangkat</li> </ul> </li> <li>6. Sosialisasi Aplikasi e-Dokumen dan SAPKT (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT</li> <li>2. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>e-KARIS/KARSU</li> <li>e-KARPEG</li> <li>e-Konversi NIP</li> </ul> </li> <li>3. Peremajaan e-Dokumen PNS pada seluruh OPD</li> <li>4. Ujicoba Tanda Tangan Digital pada Surat Kenaikan Gaji Berkala</li> <li>5. Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Database SIMPEDU dan Database SAPK BKN (Satu Data)</li> <li>2. Pengembangan SIMPEDU <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back-End Process (Database SAPK)</li> <li>• Front-End Process</li> </ul> </li> <li>3. Pengembangan SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back-End Process (Koneksi dengan Database SAPK)</li> <li>• Front-End Process</li> </ul> </li> <li>4. Pembangunan Dashboard Data Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>• EIS (Executive Information System)</li> <li>• Anjungan Data Kepegawaian</li> </ul> </li> <li>5. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Re-Design Website BKD Provinsi Lampung.</li> <li>2. Rencana PUPNSD (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah) Provinsi Lampung.</li> <li>3. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)</li> <li>2. Seluruh Pelayanan dan Informasi Berbasis Elektronik</li> </ol>

- Pink : sudah dilaksanakan
- Hijau : akan dilaksanakan

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh isu – isu strategis, isu – isu strategi tersebut antara lain :

- a. Isu strategis secara umum yang dihadapi BKD Provinsi Lampung antara lain :
  - 1) Pemetaan pegawai di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebutuhan Anjab/ABK yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur No.G/437/B.59/HK/2018 tetapi baru sesuai kualifikasi jenjang pendidikan belum sepenuhnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi;
  - 2) Peningkatan kembali kualitas pelayanan kepegawaian terutama pelayanan bersifat *online*;
  - 3) Penyesuaian Sistem Kerja sesuai Permen Pan & RB No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
  - 4) Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b. Permasalahan dan Hambatan

1. Akurasi Pemetaan Pegawai Sesuai Kebutuhan
2. Masih terdapat Penempatan ASN Belum sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensinya
3. Pemetaan kompetensi pegawai belum maksimal
4. Belum maksimalnya pengembangan kompetensi pegawai
5. Kurangnya kesadaran Pegawai terhadap aturan kepegawaian
6. Layanan Kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi
7. Ketidakselarasan antara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Peraturan Gubernur Lampung No.59 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta. Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga berdampak kepada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

c. Dampak terhadap Visi Misi Gubernur Provinsi Lampung

Dampaknya pada Tujuan Strategis yaitu **MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ASN PROVINSI LAMPUNG** dengan indikator :

1. Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

d. Tantangan dan Peluang

1. *Mismatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS;
2. Sistem penjurangan karier melalui fit and propertes (*Assesment Center*) berbasis kompetensi;
3. Peningkatan kemampuan SDM di era 4.0 berbasis *Digital system*;
4. Kebutuhan sarpras (hardware/software) untuk peningkatan otomatisasi pelayanan kepegawaian yg cepat, mudah, murah, terintegrasi, *real time* dan *paperless*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi beserta pemeliharaan keamanannya dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien
6. Penyesuaian Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

e. Isu-isu yang di tindak lanjuti ke dalam program kegiatan

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BKD sebagai fungsi penunjang kepegawaian perlu melaksanakan pendistribusian pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.

1. Penempatan ASN berdasarkan kinerja dan kompetensi

2. Penyesuaian Sistem Kerja sesuai Permen Pan & RB No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public dengan menambah pelayanan berbasis Aplikasi
4. Penyesuaian Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ada 7 point pada arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) , yaitu :

1. Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
2. Sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal
3. Perlindungan sepanjang hayat dan adaptif
4. Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan (infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)



5. **Birokrasi yang profesional dan berintegrasi dengan penguatan SDM**
6. Reformasi penganggaran pusat dan daerah
7. Penguatan data (akurat, reliable dan terintegrasi)

Pada point ke 5 terkait Birokrasi yang professional dan berintegritasi dengan penguatan SDM selaras dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Reformasi sumber daya aparatur memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah. Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, permasalahan yang di hadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedikit mengalami hambatan, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik di lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi

perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu salah satunya ada adalah Profesionalisme ASN. Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

**Tabel 2 TC-31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	25%	Rp. 9.273.243.936	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	25%	Rp. 9.273.243.936	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 14.092.122.960	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 14.092.122.960	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional**

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan public, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJMN 2019-2024 masih terdapat beberapa isu strategis selama lima tahun kedepan, antara lain :

##### **1. Profesionalitas ASN**

Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum semua Provinsi dan Kabupaten / Kota menerapkan sistem merit, selanjutnya hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik . Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN , terutama luar jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu / fungsional belum berbasiskan sektor unggul kewilayahan. Selain itu masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian.

##### **2. Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik**

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan

mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur dan Layanan. Seain itu, penerapan inovasi pelayanan public secara elektronik (*e-service*) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam.

Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan fungsional.
- b. Transformasi pelayanan publik melalui : pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik , penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Reformasi sumber daya aparatur memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menitik beratkan membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki Integritas, Profesionalisme, Netral dan bebas dari Intervensi, dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*), sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dalam upaya menempuh Tujuan sasaran strategi serta arah kebijakan dengan Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA dan Misi Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.

### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Profesionalisme PNS	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	1. Pengadaan dan mutasi pegawai	1. Perencanaan formasi dan pengadaan pegawai
			2. Penyusunan pemetaan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK
			3. Harmonisasi pengajuan rencana kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB berbasis aplikasi
			4. Penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan formasi yang kosong
			5. Penempatan PNS berdasarkan pemetaan kompetensi PNS sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah
	Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian	2. Pengembangan sumberdaya aparatur.	1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui promosi terbuka
			2. Pengisian Jabatan administrator dan pengawas sesuai kompetensi
			3. Pelaksanaan uji kompetensi PNS dalam rangka penyusunan pemetaan kompetensi
			4. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar
			5. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional tertentu

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.Peningkatan Pembinaan dan kesejahteraan pegawai	6. Data nominative PNS yang akan mengikuti diklat
			7. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS
		4. Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	8. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
			1. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data (Pengadaan, mutasi, kenaikan pangkat, e-kinerja, absensi, KGB, cuti, pensiun, e-JPT, e-JP).
			2. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur penunjang pelayanan kepegawaian
			3. Penyediaan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten
			4. Pemanfaatan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian
			5. Pengembangan ruang layanan kepegawaian di BKD

<b>VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>			
<b>MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			6. Pengembangan aplikasi data dan informasi kepegawaian terintegrasi dalam SIMPEDU BKD Provinsi Lampung
			7. Adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kab/Kota
			8. Update dan validasi data secara berkala
			10. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun 2023:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Kepegawaian Daerah**

Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Berikut akan disajikan berbentuk tabel yaitu Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan perkiraan Maju tahun 2024n, **(Tabel T-C.33, terlampir)**

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

**Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung  
Berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri No. 050-5889 Tahun 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Profesionalisme PNS	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	58%	79%	91%	100%

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2019-2024)

#### **4.2 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah**

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.21.800.758.096,- yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.111.089.211,- yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.689.668.885 ,- yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja BKD, yaitu sebagai berikut.

1. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2021, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2021 yang berpedoman sesuai

ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Semoga dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 seluruh Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.





No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5		
24	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	3.400,00	198.265.750,00	0,00	0,00	850,00	46.000.000,00	776,00	45.900.000,00	91,29	99,78	776,00	45.900.000,00	22,82	23,15	
25	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	60.000,00	527.170.527,00	0,00	0,00	15.000,00	92.309.800,00	15.000,00	42.059.200,00	100,00	45,56	15.000,00	42.059.200,00	25,00	7,98	
26	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	380,00	4.844.231.380,00	0,00	0,00	95,00	966.889.000,00	95,00	556.600.400,00	100,00	57,57	95,00	556.600.400,00	25,00	11,49	
		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>																
27	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi	2.232,00	2.472.443.287,00	0,00	0,00	595,00	402.636.098,00	351,00	366.131.500,00	58,99	90,93	351,00	366.131.500,00	15,73	14,81	
28	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Praja IPDN yang terbina dan jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	600,00	1.843.340.964,00	0,00	0,00	150,00	364.476.915,00	150,00	306.734.100,00	100,00	84,16	150,00	306.734.100,00	25,00	16,64	
29	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	800,00	266.089.877,00	0,00	0,00	200,00	61.736.000,00	200,00	49.811.100,00	100,00	80,68	200,00	49.811.100,00	25,00	18,72	
		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>																
30	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	48,00	1.229.148.518,00	0,00	0,00	12,00	285.177.000,00	9,00	239.581.700,00	75,00	84,01	9,00	239.581.700,00	18,75	19,49	
31	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	12,00	212.530.109,00	0,00	0,00	3,00	49.309.500,00	2,00	44.057.900,00	66,67	89,35	2,00	44.057.900,00	16,67	20,73	
											<b>Rata-Rata capaian kinerja %</b>		91,97	88,38			23,11	19,00
											<b>Predikat kinerja</b>		sangat tinggi	tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah

Bandar Lampung, Januari 2022  
**Mengetahui,**  
**Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Lampung,**

**MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19770505 199712 2 001**

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan perkiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Lampung**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Pendukung</b>								
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>14.111.089.211</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>16.167.965.338</b>
	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>173.750.000</b>
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 dokumen	65.000.000	APBD		13 dokumen	95.000.000
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 laporan	65.000.000	APBD		9 laporan	78.750.000
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>11.826.759.447</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>12.953.073.713</b>
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 orang/bulan	11.796.759.447	APBD		14 orang/bulan	12.920.261.213
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	BKD PROVINSI LAMPUNG	24 laporan	30.000.000	APBD		24 laporan	32.812.500
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>863.697.309</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.787.181.167</b>
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	5.169.900	APBD		12paket	8.400.000
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	270.000.000	APBD		12paket	858.899.267
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	8.000.000	APBD		12paket	8.820.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	21.000.000	APBD		12paket	22.050.000
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	20.000.000	APBD		12paket	21.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	30Laporan	29.000.000	APBD		30Laporan	30.450.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	61Laporan	510.527.409	APBD		61Laporan	837.561.900

	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>965.848.055</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>912.710.458</b>
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	267.248.055	APBD		12laporan	280.610.458
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	698.600.000	APBD		12laporan	632.100.000
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>100%</b>	<b>324.784.400</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>341.250.000</b>
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang diperlihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	21unit	269.874.400	APBD		21unit	283.500.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	46 unit	30.930.000	APBD		46 unit	32.550.000
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 unit	23.980.000	APBD		1 unit	25.200.000
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditingkatkan</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>80%</b>	<b>7.689.668.885</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>10.626.511.927</b>
	<b>PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN</b>	<b>Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>80%</b>	<b>6.028.268.885</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>7.534.106.393</b>
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	5.467.847.040	APBD		9 dokumen	6.413.606.392
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKD PROVINSI LAMPUNG	615dokumen	44.600.000	APBD		615dokumen	133.500.001
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 lembaga	315.821.845	APBD		1 lembaga	672.000.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	185 dokumen	100.000.000	APBD		185 dokumen	165.000.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	15000 dokumen	100.000.000	APBD		15000 dokumen	150.000.000
	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>75%</b>	<b>580.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.126.000.000</b>
5.03.02.1.02.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	595 orang	300.000.000	APBD		595 orang	670.000.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	BKD PROVINSI LAMPUNG	350 orang	200.000.000	APBD		350 orang	351.000.000
5.03.02.1.02.03	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	200 dokumen	80.000.000	APBD		200 dokumen	105.000.000
	<b>MUTASI DAN PROMOSI ASN</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>75%</b>	<b>931.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.625.157.599</b>
5.03.02.1.03.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	850 dokumen	51.000.000	APBD		850 dokumen	65.000.000
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 laporan	80.000.000	APBD		14 laporan	130.000.000
5.03.02.1.03.14	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan promosi ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	10dokumen	800.000.000	APBD		10dokumen	1.430.157.599
	<b>PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>	<b>Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung</b>	<b>BKD PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>75%</b>	<b>150.400.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>341.247.935</b>

5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 dokumen	100.000.000	APBD		12 dokumen	285.247.935
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	BKD PROVINSI LAMPUNG	15 orang	50.400.000	APBD		15 orang	56.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>21.800.758.096</b>			<b>26.794.477.265</b>	

Bandar Lampung, Januari 2022  
**Mengetahui,**  
**Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Lampung,**

**MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19770505 199712 2 001**





